



RENCANA KERJA TAHUN 2022

RENJA

**DINAS PERIKANAN
KOTA KENDARI
2021**



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2022

RENJA

**DINAS PERIKANAN
KOTA KENDARI
2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "**Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022" dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 - 2022, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Kendari serta Target dan Sasaran Pembangunan Perikanan yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari, serta sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good governance*.

Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Perikanan Kota Kendari.

Dengan disusunnya RENJA ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Kendari, Oktober 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA KENDARI,**



IMRAN ISMAIL, S.Pt., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19711214 200003 1 005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tinjauan Umum	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	23
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	32



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Kendari adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan perikanan di Kota Kendari sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2022.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan ini mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan perikanan di Kota Kendari sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD Kota Kendari dan Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 – 2022.

Renja Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja Tahun ke 5 (lima) pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode masa pemerintahan tahun 2018 hingga akhir masa pemerintahan 2022, sehingga keberhasilan pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 ini sangat menentukan kinerja SKPD tahun yang akan datang.

1.1. Tinjauan Umum

Kota Kendari merupakan Kota yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar serta ditunjang dengan tersedianya sarana informasi dan kelembagaan. Walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap tersebut, di dalam perspektif pembangunan perikanan yang menunjang pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kota Kendari masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Kota Kendari memiliki 11 (Sebelas) wilayah kecamatan pesisir yang terdiri dari 65 kelurahan Pesisir yang sebagian masyarakatnya merupakan rumah tangga perikanan yang sangat berkaitan dengan komponen permasalahan yang dominan. Dengan proporsi tersebut, maka diyakini bahwa dengan akselerasi pembangunan di sektor perikanan berpotensi memperkuat fundamental ekonomi Kota Kendari melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat perikanan, penciptaan peluang kerja pedesaan dan reduksi tingkat kemiskinan struktural di dalam lingkup regional.

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, dalam rangka terwujudnya produk perikanan yang berdaya saing sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha perikanan, serta dapat dicapainya kecukupan pangan protein hewani bagi masyarakat Kota Kendari, maka dirasakan masih diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan.

Adapun dari hasil identifikasi permasalahan yang mendasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan perikanan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah serta kewenangan Dinas Perikanan Kota Kendari. Di lain pihak dengan melihat karakteristik pelaku usaha perikanan di Kota Kendari yang sebagian besar adalah nelayan tradisional dan pembudidaya kecil, maka kebijakan dan program yang disusun harus mampu menjadi pelindung bagi nelayan tradisional dan pembudidaya kecil tersebut dan memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi para nelayan dan pembudidaya yang berkeinginan untuk maju dan berkembang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam memotivasi dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah yang terintegrasi dan berkesinambungan namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.

Begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang di hadapi dan terbatasnya sumber daya serta tidak terprediksikan berbagai faktor luar yang menjadi penghambat pembangunan perikanan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Pembangunan di bidang perikanan yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan agar mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan perikanan Kota Kendari.

Untuk menunjang pencapaian target dan sasaran tersebut, melihat keterbatasan sumber daya yang tersedia maka diperlukan fokus prioritas kegiatan serta sinergitas berbagai sumber daya, secara komprehensif dituangkan didalam kegiatan-kegiatan secara tahunan, yang diusulkan dan diakomodir untuk difasilitasi dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (APBN), APBD Provinsi, dan APBD Kota Kendari.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut RENJA SKPD, disusun oleh Dinas Perikanan Kota Kendari berdasarkan RENSTRA yang telah sesuai dengan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama satu tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Perwujudan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan 2018 – 2022 dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan perikanan Kota Kendari dilakukan melalui penancangan 5 (lima) target utama, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Minapolitan

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Dinas Perikanan Kota Kendari;

2. Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (enterprenuership) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah;

3. Teknologi dan Inovasi Usaha

Perikanan akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem budidaya, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim;

4. Pemberdayaan Masyarakat

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistimatis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya perikanan secara mandiri untuk peningkatan kesejahteraan.

5. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi.

Dengan demikian untuk memenuhi target utama yang akan dicapai agar terarah maka kebijakan umum pembangunan perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan (*pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*).
- d. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya perikanan.
- e. Mengembangkan dan memperkuat industri, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- f. Meningkatkan kinerja, manajerial, teknis SDM, peralatan kerja, pendataan, pelayanan, koordinasi dengan *stake holder*, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perikanan secara cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
- g. Mendorong minat investasi perikanan serta kemitraan usaha antara pelaku usaha perikanan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Perikanan Kota Kendari diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 yang dimuat dalam bentuk program dan kegiatan terdiri dari 4 (Empat) Program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang - undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2018 – 2022;
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Kendari;.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Kendari adalah :

- a. Menjabarkan Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2018-2022 ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2022 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang Perikanan.
- c. Menghasilkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kota Kendari Tahun 2022.
- d. Menjadi pedoman dalam Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kendari Tahun 2022;
- e. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran DAK dan Tugas Pembantuan Kementerian Perikanan Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022, untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan perikanan antar wilayah dan tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor perikanan.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Tinjauan Umum
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan Renja SKPD

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penetapan Kinerja (TAPJA) merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja (RENJA), dengan demikian penetapan rencana kerja dibuat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui tindakan yang terukur serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Evaluasi Capaian Kinerja digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan target dari penetapan kinerja Dinas Perikanan serta hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan capaian Renstra SKPD bahwa Program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 terdiri dari 11 program, sesuai dengan program yang ada dalam RENSTRA SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2018 - 2022.

Program yang dilaksanakan dalam Renja Tahun 2021 meliputi :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Secara ringkas capaian kinerja program Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Capaian Program Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2021.

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dalam DPA Tahun 2021	Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran (%)
1					2	3	5	6	7=(7/5)*100
3	25				BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		12,662,029,883	11,048,194,817	87.25
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananyanya Pemerintahan Yang Baik	5,997,560,525	5,377,213,238	89.66
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,838,480	14,836,000	99.98
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,734,660	7,732,750	99.98
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,103,820	7,103,250	99.99
3	25	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	5,165,777,232	4,566,767,102	88.40
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5,138,557,832	4,539,568,102	88.34
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27,219,400	27,199,000	99.93
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	267,477,740	267,115,640	99.86
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2,541,638	2,538,000	99.86
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	52,933,252	52,885,000	99.91



3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7,079,850	7,079,000	99.99
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,425,000	23,387,400	99.84
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181,498,000	181,226,240	99.85
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	331,347,238	317,293,100	95.76
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.	51,233,580	51,231,000	99.99
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	280,113,658	266,062,100	94.98
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,653,675	106,065,399	96.73
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,050,000	1,032,000	98.29
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	30,758,985	27,190,399	88.40
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum Kantor	77,844,690	77,843,000	100.00
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	108,466,160	105,135,997	96.93
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,841,160	96,510,997	96.66
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,890,000	1,890,000	100.00
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,800,000	4,800,000	100.00
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,935,000	1,935,000	100.00
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3,501,124,443	2,697,676,500	77.05
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penangkapan Ikan dalam daerah Kabupaten/Kota	3,485,614,863	2,682,167,000	76.95



3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3,485,614,863	2,682,167,000	76.95
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan bagi Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	15,509,580	15,509,500	100.00
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	15,509,580	15,509,500	100.00
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Hasil Budidaya Perikanan	3,090,200,785	2,905,508,509	94.02
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan bagi Pembudidaya Ikan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,717,537	0	0
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	99,717,537	0	0
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bagi Pembudidaya Ikan	2,990,483,248	2,905,508,509	97.16
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,725,673,909	2,644,787,909	97.03
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	182,991,158	179,720,600	98.21
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	81,818,181	81,000,000	99.00
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil Olahan Perikanan	73,144,130	67,796,570	92.69
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya Mutu Hasil usaha Pengolahan dan Pemasaran skala mikro dan kecil	71,399,130	67,796,570	94.95
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	71,399,130	67,796,570	94.95
3	25	06	2.02		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya serta Tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan guna pemenuhan Konsumsi ikan Masyarakat	1,745,000	0	0

3	25	06	2.02	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,745,000	0	0
---	----	----	------	----	--	--	-----------	---	---

Berdasarkan pada Tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU berdasarkan Anggaran Penetapan mencapai 87,25 %. Nilai Capaian ini menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kota Kendari dalam kurun waktu tahun 2021 menggambarkan kinerja yang baik.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan SKPD-Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi umum pemerintahan daerah. Tahun 2021 Dinas Perikanan melalui program ini memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 5,997,560,525 dan terealisasi sebesar Rp. 5,377,213,238,- atau 89.66% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan antara lain:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.838.480 untuk membiayai penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.14.836.000 (99,98%).
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.165.777.232 untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran SKPD Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.4.566.767.102 (88,40%).
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 267.477.740 untuk membiayai Bahan logistik Kantor, barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu serta rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.267.115.640 (99,86%).
- Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 331.347.238 untuk membiayai Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.317.293.100 (95,76%).

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 109.653.675 untuk membiayai jasa Surat menyurat, jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor SKPD. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.106.065.399 (95,73%).
- f. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 108.466.160 untuk membiayai Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya, serta pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.105.135.997 (96,93%).

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor perikanan tangkap melalui pengelolaan sumber daya perikanan serta pemberdayaan nelayan kecil. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.501.124,443 dan terealisasi sebesar Rp. 2.697.676.500 (77,05 %). Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 3.485.614.863 yang meliputi penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.2.682.167.000 (76,95%).
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 15.509.580 yang digunakan dalam rangka peningkatan kapasitas nelayan kecil. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.15.509.000 (100%).

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor perikanan budidaya melalui pengelolaan sumber daya perikanan serta pemberdayaan pembudidaya ikan kecil. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.090.200,785 dan terealisasi sebesar Rp. 2.905.508.509 (94,02 %). Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan pembudidayaan Ikan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.990.483.248 yang meliputi penyediaan prasarana usaha perikanan budidaya. Penjaminan ketersediaan sarana bagi pembudidaya ikan serta perencanaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp.2.905.508.509 (94,02%).
- b. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan anggaran sebesar Rp. 99.717.637 yang digunakan dalam rangka peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil. Realisasi dari

kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0%). Tidak terlaksananya kegiatan ini karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka penanganan COVID-19 yang tidak membolehkan adanya kegiatan perkumpulan lebih dari 20 orang.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk hasil perikanan melalui pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan dalam daerah. Alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 73.144.130 dan terealisasi sebesar Rp. 67.796.570 (92,69 %). Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan anggaran sebesar Rp. 71.399.130 yang meliputi pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp. 67.798.570 (94,95%).
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota, dengan anggaran sebesar Rp. 1.745.000 yang meliputi pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Anggaran kegiatan ini merupakan kegiatan Retensi/pemeliharaan pembangunan Pagar Depo Rumput Laut Tahun 2014. Realisasi dari kegiatan ini sebesar Rp. 0 (0%). Tidak terealisasinya kegiatan ini karena pihak ketiga tidak mengajukan pembayaran biaya retensi yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan untuk tidak menarik pembayaran biaya retensi.

Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2021

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2021.

Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
PENDAPATAN	2.205.000.000	1.238.215.700	56,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.205.000.000	1.238.215.700	56,15
Pendapatan Retribusi Daerah	2.205.000.000	1.238.215.700	56,15
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0

Tabel 2.2. di atas dapat dijelaskan bahwa target pendapat dinas perikanan tahun 2021 sebesar Rp. 2.205.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 1.238.215.700 atau sebesar 56,15% dari target yang diharapkan. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Kendari. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya (Tahun 2020) maka PAD sektor Perikanan mengalami kenaikan dimana realisasi PAD tahun sebelumnya mencapai Rp. 885.835.400,-. Target Pendapatan berdasarkan pos pendapatan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Kota Kendari Berdasarkan Pos Pendapatan Tahun 2021.

KODE	POS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI
4.1.2.14.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000	112.917.000
4.1.2.14.05	Retribusi Pemakaian Ruangan	600.000.000	382.953.700
4.1.2.16.01	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	700.000.000	580.397.000
4.1.2.16.02	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	0	3.640.000
4.1.2.18.01	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	550.000.000	119.471.000
4.1.2.21.01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000	27.267.000
4.1.2.24.03	Retribusi Penjualan Produksi hasil usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	55.000.000	11.250.000
4.1.4.48.01	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	320.000
JUMLAH		2.205.000.000	1.238.215.700

Berdasarkan Pos Pendapat dapat dijelaskan bahwa penyumbang PAD terbesar sektor perikanan Kota Kendari yaitu pada Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Pemakaian Ruangan, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan serta Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Berdasarkan Target, Capaian Pendapatan Sektor Perikanan Tahun 2021 masih belum Optimal jika dibandingkan Capaian pada tahun sebelumnya, namun secara nilai terjadi peningkatan yang sangat baik dimana Realisasi Pendapatan Sektor Perikanan Tahun 2021 mencapai Rp. 1.238.215.700, dibandingkan dengan capaian PAD tahun sebelumnya (Tahun 2020 hanya mencapai Rp. 885.835.400)

Pencapaian target PAD bidang Perikanan Tahun 2021 sebagaimana target yang diharapkan tersebut masih perlu dioptimalkan sehingga menjadi tugas bagi OPD Dinas Perikanan Kota Kendari, dan yang menjadi tantangan bagi Dinas Perikanan Kota Kendari kedepannya adalah bagaimana mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Hal ini juga sangat dibutuhkan dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana Perikanan di Kota Kendari.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5). Selanjutnya dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota, dimana Dinas Perikanan Kota Kendari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi : (1) Perumusan kebijaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan; (2) pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan usahanya dalam 1 (satu) daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan; (4) pembinaan terhadap

UPTD lingkup dinas; (5) pelaksanaan administrasi dinas, dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Kendari terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan, Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Kepala Bidang Usaha Budidaya dan Pembenihan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) masing-masing dipangku oleh seorang Kepala, yaitu terdiri dari :

1. Kepala UPTD TPI-PPI Kendari
2. Kepala UPTD TPI-PPS Kendari
3. Kepala UPTD BBIAT Kota Kendari
4. Kepala UPTD PIH Kota Kendari

Masing-masing Bidang membawahi beberapa Sub Bagian dan Seksi, yaitu :

1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan
 - b. Seksi Produksi, Kemitraan Usaha dan IPTEK
 - c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
3. Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan TPI, membawahi 3 (tiga) Seksi:
 - a. Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan
 - b. Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
4. Bidang Usaha Budidaya dan Pembenihan, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
 - c. Seksi Pengelolaan Unit Pembenihan

Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kota Kendari mengharapkan produktivitas yang tinggi, tetapi tetap memperhatikan kelestarian dan pencagaran sumberdaya alam. Sumberdaya perikanan bersifat *renewable* (dapat diperbaharui) antara lain, meliputi plankton, benthos, ikan, moluska, krustacea dan mamalia laut, yang apabila dikelola

dengan baik dan benar mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian rakyat, daerah dan negara secara berkelanjutan dan tetap lestari. Untuk lebih meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi tersebut diperlukan infrastruktur yang komplit, peraturan yang jelas serta dukungan penuh dari masyarakat, instansi terkait baik swasta maupun pemerintah.

Potensi Sumberdaya Perikanan Kota Kendari cukup besar baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun diversitas, yang terdiri dari :

- (1) Perikanan Tangkap;
- (2) Perikanan Budidaya;
- (3) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pengembangan Perikanan di Kota Kendari diarahkan pada peningkatan sarana dan teknologi baik penangkapan, budidaya maupun pengolahan dan pemasaran dalam upaya peningkatan produksi untuk mendukung ekspor hasil perikanan.

Produk Perikanan Tangkap dan budidaya yang di ekspor antara lain Tuna, Cakalang, Gurita, Layang, Tenggiri, ikan kerapu, kakap putih, kakap merah dan rumput laut. Permintaan pasar yang cukup tinggi terhadap komoditi ini terutama dari Negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan China. Budidaya yang dikembangkan Keramba Jaring Apung (KJA), Keramba Jaring Tancap (KJT), budidaya air payau (tambak udang dan bandeng) dan budidaya air tawar.

Infrastruktur yang menunjang Kegiatan Penangkapan di Kota Kendari adalah tersedianya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Kelurahan Puday kecamatan Abeli, terbangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/TPI) di Kelurahan sodohoa Kecamatan Kendari Barat, serta tersedianya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang meliputi Armada dan Alat Tangkap. Untuk kegiatan budidaya antara lain dibangunnya Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia dan Balai Benih Udang (BBU) di Kelurahan Mata Kecamatan Kendari, serta sarana dan prasarana budidaya lainnya seperti Keramba Budidaya Abalone, keramba budidaya laut dan keramba ikan air tawar. Adapun sarana dan Prasarana pengolahan yang telah dibangun di Kota Kendari antara lain Depo Pemasaran hasil laut di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Abeli, Cold Storage kapasitas 10 Ton di PPI/TPI Sodohoa Kendari.

Dalam rangka menanggulangi *over fishing* maka digalakkan kegiatan budidaya sehingga nelayan memiliki alternatif dalam mata pencahariannya dan tidak hanya mengandalkan hasil



tangkapan saja, selain itu untuk menciptakan keseimbangan dalam pemanfaatan dan pengembangan perairan dan pesisir hingga tercipta keseimbangan ekosistem darat dan laut. Produk olahan yang menjadi andalan Kota Kendari antara lain Abon ikan/udang, Bakso ikan, Nuget Ikan/Rumput Laut, Tepung Ikan dan Kerupuk Ikan baik yang mentah maupun yang telah jadi. Kegiatan pengolahan hasil perikanan sangat menunjang diversifikasi perikanan, karena dengan begitu akan memperkecil resiko kerugian dalam usaha perikanan Kota Kendari tahun terakhir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan :

“MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL”

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2022, maka dilakukan penyesuaian komponen yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan pengukuran kinerja melalui beberapa indikator kinerja utama yang pada akhirnya ditetapkan melalui Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 berpijak dari arah kebijakan dan strategi nasional dalam hal ini adalah Kementerian Perikanan (KKP) dan disejalkan dengan arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari yang mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan saat ini maupun dalam lima tahun mendatang. Untuk itu arah kebijakan umum pembangunan Dinas Perikanan 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain Pengembangan PPI/TPI Kendari, bantuan sarana dan armada penangkapan, Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar, peningkatan dan pengembangan usaha budidaya dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran.
2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP).
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan (*pro poor, pro job, pro growth dan pro sustainability*).
4. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya perikanan.
5. Mengembangkan dan memperkuat industri, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Meningkatkan kinerja, manajerial, teknis SDM, peralatan kerja, pendataan, pelayanan, koordinasi dengan *stake holder*, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perikanan secara cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
7. Mendorong minat investasi perikanan serta kemitraan usaha antar pelaku usaha (*pro business*).

Sedangkan strategi pembangunan perikanan Kota Kendari dalam menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut berlandaskan arah dan kebijakan umum adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pengembangan perikanan tangkap, melalui pengembangan sarana armada dan alat tangkap perikanan, pelabuhan perikanan serta pengelolaan sumberdaya ikan.
2. Percepatan pengembangan perikanan budidaya, melalui peningkatan sarana prasarana budidaya laut, air payau, air tawar serta pembenihan.
3. Percepatan pengembangan pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, kelembagaan masyarakat perikanan melalui pengembangan sarana prasarana pengolahan, pemasaran, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan, pengendalian, pengujian serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan.
4. Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian sumberdaya perikanan melalui konservasi, program coremap, pengawasan dan penataan pemanfaatan potensi.
5. Peningkatan kualitas pelayanan, SDM aparatur dan masyarakat perikanan secara terintegrasi, melalui pendidikan, pelatihan dan magang serta peningkatan pelayanan

administrasi, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

6. Menjadikan rumput laut sebagai komoditi unggulan, melalui pembinaan pembudidayaan yang berkesinambungan.
7. Pengembangan sentra produksi perikanan terpadu, melalui pengembangan minapolitan.
8. Memperkuat akses pasar lokal, domestik dan internasional, melalui promosi dan kerjasama dengan komunitas bisnis dan masyarakat lingkup lokal, nasional dan internasional.
9. Penguatan jejaring kerja, melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik lingkup Dinas Perikanan, Provinsi, Kementerian Perikanan, Pemerintah Pusat, lintas instansi/sector, dunia usaha, masyarakat dan lembaga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan dirancang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang sejalan dengan RPJMN, RPJMD, dan RENSTRA serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Kendari. Tujuan dan sasaran merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD Kota Kendari dan RENSTRA Dinas Perikanan 2018 – 2022 yang merupakan tanggung jawab Dinas Perikanan.

Melalui perumusan tujuan dan sasaran akan diperoleh pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung di dalam RPJMD Kota Kendari dan RENSTRA Dinas Perikanan Kota Kendari 2018 -2022. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus dijabarkan secara detail sehingga akan diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terukur, spesifik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Pembangunan Perikanan sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 31 Tahun 2004 (UU No. 45 Tahun 2009) Tentang Perikanan Pasal 3. antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan-kecil;
2. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;

6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Berdasarkan Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2018 – 2022 maka telah ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kendari: **“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI”**. Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Kendari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Kendari. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan Pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi pemerintah kota kendari adalah peningkatan ketahanan pangan, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya produktivitas sektor perikanan.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Kota Kendari

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2020	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	45.000	47.250	49.000	51.000	53.000

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Kota Kendari maka Dinas Perikanan mengemban tanggung jawab pada misi pertama yakni meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka sasarannya adalah meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI			
Misi 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Nilai Tambah dan Jangkauan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk hasil Perikanan

Adapun strategi OPD DKP Kota Kendari dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui program peningkatan nilai tambah serta jangkauan dan akses pemasaran hasil-hasil perikanan yang didukung dengan kebijakan pemerintah melalui peningkatan sarana-dan prasarana perikanan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dan akses informasi yang cepat.

Sebagai implementasi dan penjabaran Misi Pemerintah Kota Kendari serta tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kendari Tahun 2018-2022 maka Dinas Perikanan menetapkan arah tujuan yang akan dicapai melalui:

- 1). Peningkatan kesejahteraan hidup dan kemandirian nelayan dan pembudidaya ikan.
- 2). Peningkatan produksi dan produktivitas hasil-hasil perikanan.
- 3). peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya Perikanan.
- 4). Peningkatan fungsi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.
- 5). Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan ekonomi sektor Perikanan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
- 6). Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 7). Peningkatan kompetensi, kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur.
- 8). Pemberdayaan masyarakat secara efektif dalam mengelola potensi sumberdaya Perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai sasaran maka ada beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain:

1. Pro – Poor:

Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar, serta masyarakat kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

2. Pro – Job:

Pengembangan infrastruktur perikanan dan intensifikasi-ekstensifikasi usaha perikanan.

3. Pro – Growth:

Peningkatan daya saing industri perikanan dan iptek perikanan.

4. Pro – Sustainable:

Pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

5. Pro – Business:

Pengembangan kerjasama, kemitraan usaha, dan penataan regulasi.

Tabel 3.3. Target Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1.	Tercapainya Peningkatan produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	53000
		- Perikanan Tangkap (Ton)	48.000
		- Perikanan Budidaya (Ton)	5.000
2.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	55

Sebagai penjabaran dari tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka sasaran Pembangunan Perikanan Kota Kendari yang akan dicapai di tahun 2022 adalah :

- 1). Tercapainya peningkatan produksi perikanan.
- 2). Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kota Kendari memiliki fokus dalam mewujudkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) sasaran indikator kinerja. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya
2. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan
3. Jumlah Program dan kegiatan yang diakomodir pada tahun anggaran 2022.

3.3. Program dan Kegiatan

Guna mendukung pencapaian target kinerja tersebut maka disusunlah rencana program dan kegiatan. Program-program tersebut merupakan perencanaan strategis yang berisikan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran yang akan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari. Program yang menjadi rencana kinerja tahunan Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 (Empat) Program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Adapun kegiatan dan Sub kegiatan Renja Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 secara rinci disajikan pada Tabel 3.4 :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 0.00.0.00.01.00	DINAS PERIKANAN
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	25	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap



3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Penembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu daerah kabupaten/kota
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan Kecil.
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Uraian Program dan Kegiatan diatas telah diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, koordinasi sinkronisasi perencanaan dengan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dari uraian Program dan Kegiatan di atas, terlihat secara detail Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2022 yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dalam rangka pencapaian, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja pada level sasaran beserta target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RENJA Tahun 2022.

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2018-2022. Dalam implementasi kegiatan pokok Dinas Perikanan Kota Kendari Rencana Kinerja Program Tahunan DKP Kota Kendari Tahun 2022 yang meliputi indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan serta rencana (target) capaiannya.

Sebagai bentuk komitmen dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Kendari dan mendukung target capaian Kepala Daerah pada sub sektor Perikanan di Kota Kendari, maka diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja antara Dinas Perikanan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas dengan Walikota Kendari, dijadikan landasan pengukuran kinerja pada tahun 2022. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun target Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 ini adalah usulan Rencana Kinerja dalam rangka Fasilitasi Pembangunan Perikanan Kota Kendari Tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan Kota Kendari 2018 - 2022, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Kendari serta Target dan Sasaran Pembangunan Perikanan secara nasional yang ditetapkan melalui SKPD Dinas Perikanan Kota Kendari.

Renja Dinas Perikanan Kota Kendari merupakan dokumen perencanaan kinerja pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan perikanan yang bersumber anggaran dari APBD II, APBD I, dan APBN Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyusunan renja telah diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, koordinasi sinkronisasi perencanaan dengan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. yang menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan perikanan di Kota Kendari.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dengan adanya Renja Dinas Perikanan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.



Lampiran



**RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1					2	3	4	5	6
3	25				BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,759,977,151
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Baik	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	7,809,977,151
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	52,200,000
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENJA RKPD/OPD	Jumlah Dokumen RENJA RKPD/OPD	1 Dokumen	12,000,000



3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,800,000
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,000,000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP/SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP/SAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,400,000
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,804,400,000
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,750,000,000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen LKPD	Jumlah Dokumen LKPD	1 Dokumen	10,000,000
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	44,400,000



3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	274,000,000
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	58 Orang	86,000,000
3	25	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan pemerintah.	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	50 Orang	38,000,000
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi ASN	Jumlah pegawai yang melaksanakan bimbingan teknis	8 Orang	150,000,000
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	826,271,000
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	45,000,000
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan perlengkapan kantor	12 Bulan	40,000,000
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	30,000,000



3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan Logistik Kegiatan Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kegiatan kantor	12 Bulan	125,000,000
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	75,000,000
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Koran, Majalah, Buku Profil Perikanan serta Perda Perikanan)	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35,000,000
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman Tamu	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan makan dan minuman tamu	12 Bulan	45,000,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terjalannya sinkronisasi program dan kegiatan	Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Orang	431,271,000
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,220,606,151
3	25	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan bagi ASN (1 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	530,000,000



3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor (Meja Biro 2 Unit, Meja Biro 1/2 10 Unit, Kursi Biro 4 Unit, Kursi Rapat 30 Unit, dan Lemari Arsip 4 Unit)	Jumlah Pengadaan Mebel	50 Unit	87,000,000
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin penunjang urusan pemerintahan daerah (Smart TV, Komputer PC/Laptop dan Printer)	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Penunjang	12 Unit	134,000,000
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	8 Unit	85,000,000
3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	4 paket	384,606,151
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	156,500,000
3	25	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000



3	25	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (Listrik, Air PDAM, Telepon, Internet/Wifi, Website OPD serta Biaya Jasa Tambah Daya Listrik)	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 Bulan	78,000,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Tenaga Administrasi, Operator Komputer dan Sopir OPD)	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	72,500,000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	476,000,000
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan.	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	380,000,000
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	52,000,000



3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Bersih (Jasa Tenaga Kebersihan / Cleaning Service)	Jumlah bulan peneyediaan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	12,000,000
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan sarana prasarana gedung kantor	12 Bulan	32,000,000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Jumlah Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Tangkap	100%	750,000,000
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya Pengelolaan Potensi Perikanan Tangkap	Persentase Jumlah Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Tangkap	100%	660,000,000
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Tersedianya Data SDI	Jumlah Dokumen Penyediaan Data SDI	1 Dokumen	10,000,000
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Paket Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1 Paket	500,000,000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarpras Perikanan Tangkap	Jumlah Paket Ketersediaan Sarana dan Usaha Perikanan Tangkap	1 Paket	150,000,000



3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	100%	40,000,000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Skala Usaha Nelayan Nelayan	Jumlah Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50 Orang	28,000,000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Nelayan	Jumlah KUB yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	3 KUB	12,000,000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Persentase pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	100%	50,000,000
3	25	03	2.03	02	Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Meningkatnya Pelayanan di TPI Kota Kendari	Jumlah Penyelenggaraan TPI	2 TPI	50,000,000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Hasil Budidaya Perikanan	Persentase Jumlah Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Budidaya	100%	1,072,000,000
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perizinan bidang Perikanan Budidaya	Persentase Terlaksananya Perizinan Bidang Perikanan Budidaya	100%	58,000,000



3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Ditetapkannya SOP Bidang Perikanan Budidaya.	Jumlah Dokumen SOP Bidang Perikanan Budidaya	50 Dokumen	8,000,000
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya Ikan yang usahanya, lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Pelayanan Izin Bidang Perikanan Budidaya	Jumlah Dokumen Perizinan Bidang Perikanan Budidaya	50 Dokumen	50,000,000
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.	Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya Ikan	Persentase Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan	100%	38,000,000



3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya skala usaha budidaya ikan	Jumlah Kelompok Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	5 KUB	28,000,000
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan KUB	Jumlah Kelompok Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	5 KUB	10,000,000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Yang Disediakan	15 Paket	976,000,000
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data perikanan budidaya	Jumlah Dokumen Data Perikanan Budidaya	1 Dokumen	10,000,000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana budidaya yang baik	Jumlah Paket Prasarana Budidaya Yang Baik	5 Paket	500,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Budidaya Perikanan	Jumlah Paket Sarana Pembudidayaan Ikan	10 Paket	100,000,000
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Terbinanya KUB pembudidaya ikan	Jumlah KUB yang dilakukan pembinaan	10 KUB	16,000,000



3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan UPTD BBIAT Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan UPTD BBIAT Kota Kendari	1 Dokumen	350,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya daya saing produk hasil olahan perikanan	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas	100%	128,000,000
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terdaftaranya KUB Usaha Pengolahan Ikan	Persentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Sudah Diterbitkan	100%	10,000,000
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Dokumen	10,000,000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan	Persentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	100%	103,000,000

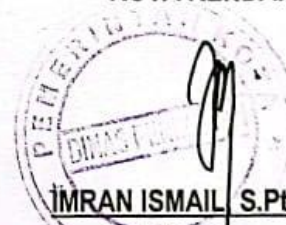


3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.	Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha (KUB) Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah KUB yang mengikuti bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan	11 KUB	103,000,000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya serta tersalurkannya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan	100%	15,000,000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kabupaten/Kota	Terbinanya pelaku usaha bidang KP	Jumlah KUB yang diberikan fasilitas usaha perikanan skala mikro dan kecil	3 KUB	15,000,000

Kendari, Oktober 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA KENDARI

IMRAN ISMAIL S.Pt., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, GOL IV/c

NIP. 19711214 200003 1 005